



Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Nusa Tenggara Timur

Pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan kesehatan ekosistem dan kesejahteraan seluruh masyarakat untuk masa depan kemilau



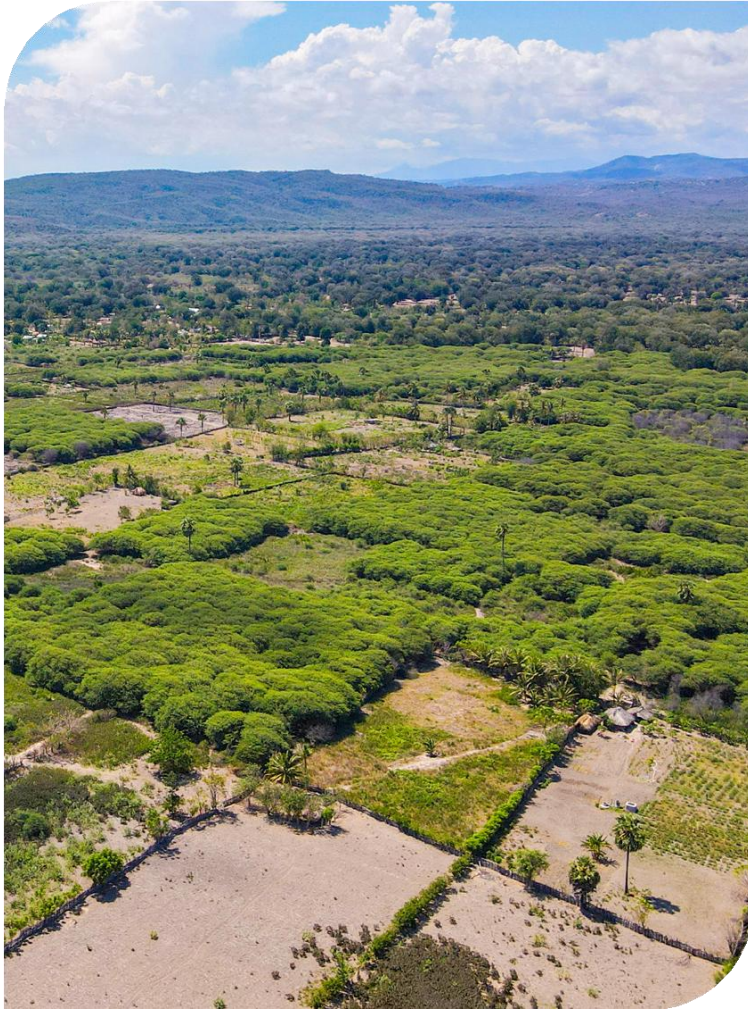
POKJA PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Disampaikan pada Konsultasi Publik Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau-Kupang, 7 Mei 2025



Alur Pembahasan

1. Latar Belakang dan Tujuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau NTT
2. Prinsip Pengembangan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau
3. Rumusan tujuan, strategi, dan skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau
4. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Hijau
5. Kaidah pelaksanaan dan penutup



1

Latar Belakang dan Tujuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Nusa Tenggara Timur





Perencanaan Pembangunan Berbasis Lahan dan Sumber Daya Terbarukan

- Bentang lahan merupakan inti dari pendekatan GGP karena perannya sebagai **sumber daya dan penyedia jasa ekosistem**;
- Kebutuhan akan ruang dalam melakukan kegiatan **ekonomi terus bertumbuh, sedangkan ketersediaan lahan cenderung tetap**;
- Menyesuaikan **kebutuhan lahan untuk beragam penggunaan oleh berbagai pemangku kepentingan** merupakan hal yang krusial untuk mendapatkan pertumbuhan berkelanjutan dari sektor berbasis lahan;
- Heterogenitas spasial mengharuskan **pendekatan eksplisit secara spasial dalam perencanaan**, tetapi hal ini masih terkendala karena sistem peta tunggal (*one map*) belum tersedia dan rencana pembangunan sering kali tidak realistis, karena tidak mempertimbangkan ketersediaan lahan dan tidak spesifik lokasi;
- Perencanaan tata guna lahan dapat berfungsi sebagai bagian dari **kajian lingkungan hidup strategis untuk menyaring pembangunan dan rencana tata ruang** yang tidak berkelanjutan;

Mengapa NTT Butuh Pertumbuhan Ekonomi Hijau?



- Dampak perubahan iklim – seperti krisis air, longsor, dan banjir – semakin dirasakan oleh masyarakat NTT.
- Cuaca ekstrem juga telah memengaruhi produktivitas beberapa komoditas pertanian unggulan NTT, seperti padi, jagung, dan kopi
- Sektor ekonomi tertinggi di NTT adalah **sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi lebih dari seperempat perekonomian wilayah (27,17%)**. Sektor yang menempati urutan keduanya adalah perdagangan (12,62%) sedangkan industri pengolahan masih sangat rendah (1,28%) yang menandakan **masih rendahnya tingkat hilirisasi dan pengolahan hasil produksi lokal**
- Menciptakan ketangguhan iklim menjadi tantangan bagi pembangunan di NTT, terutama upaya mengatasi isu-isu strategis yang dituangkan di RPJPD: kemiskinan, *stunting*, kualitas sumber daya manusia
- Sebagai provinsi yang pembangunannya banyak ditopang oleh sektor berbasis alam, NTT **perlu pendekatan dalam melakukan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan serta aspek-aspek sosial-ekonomi**. Pendekatan ini **perlu disepakati oleh semua pemangku kepentingan**.
- Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi **penurunan kapasitas lingkungan** untuk menunjang penghidupan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi, **meningkatkan risiko bencana serta menyulitkan NTT untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan iklim**

Kebijakan dan Peraturan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau



Nasional

Sistem perencanaan	Perencanaan Lingkungan Hidup	Perencanaan Pembangunan	Perencanaan Tata Ruang
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN)	Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pembangunan Lingkungan Hidup (PPLH).	Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045	Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Perencanaan Ruang (UU PR)
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Pengendalian Emisi GRK	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
	Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional	Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Nusa Tenggara Timur

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2045



2

Prinsip Pengembangan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau





Prinsip proses Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau



Informed – data dan Informasi

Prinsip *informed* memastikan bahwa dampak *ex-ante* terhadap ekonomi sosial dan lingkungan dinilai berdasarkan pengetahuan yang berasal dari data, informasi, dan pemahaman proses dan fungsi yang kontekstual.

Proses Inklusif

Melibatkan semua pemangku kepentingan terkait dalam membahas, menyampaikan aspirasi, dan merundingkan strategi dan intervensi ekonomi hijau melalui pengetahuan dan konteks lokal.

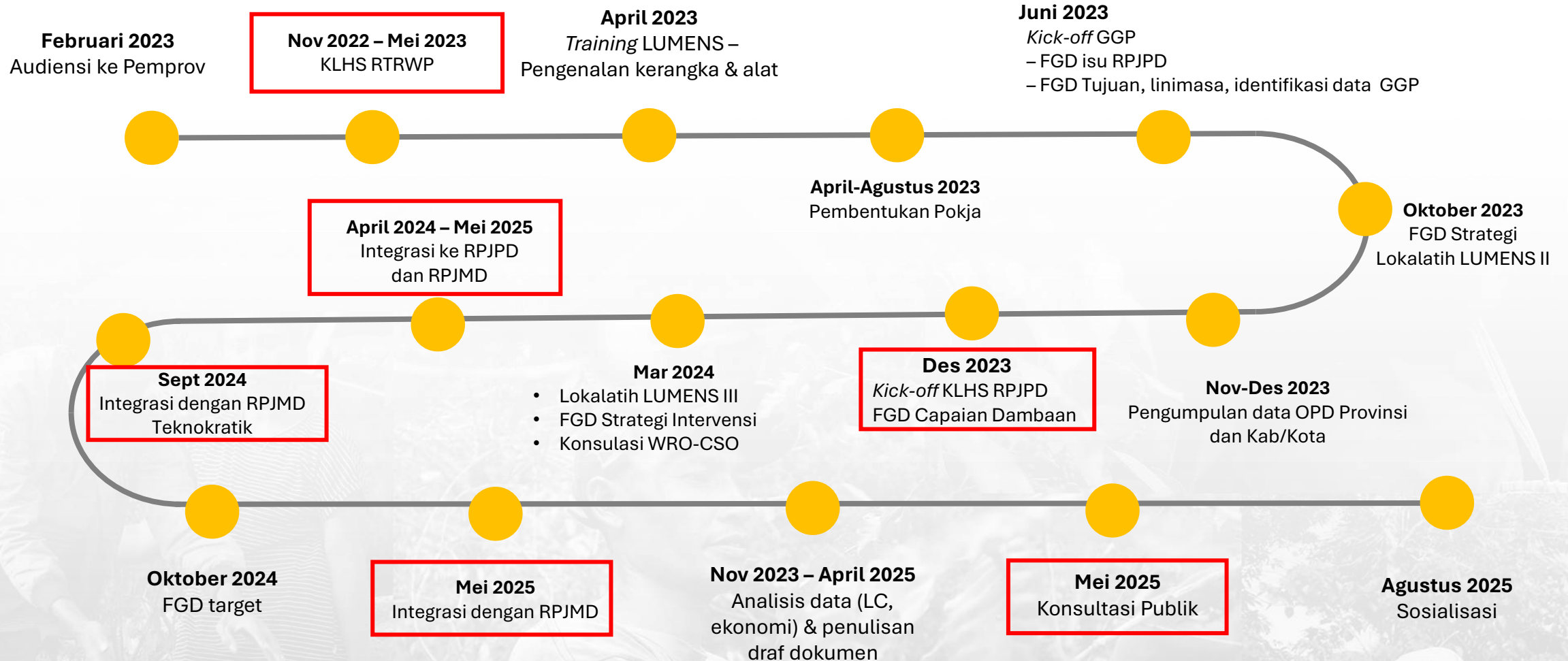
Integratif – Visi dan Muatan

Menggarisbawahi pentingnya memiliki proses yang bersinergi dan tujuan yang selaras di seluruh konservasi, pembangunan, dan perencanaan tata ruang, serta menghindari *silo*.

Tahapan Proses Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau



Lini Masa Proses Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau





3

Rumusan Tujuan, Strategi, dan Capaian Dambaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau





Empat tujuan pertumbuhan ekonomi hijau NTT telah diintegrasikan dalam proses RPJPD dan diselaraskan dengan Visi Pembangunan **NTT Maju, Sehat, Cerdas Sejahtera dan Berkelanjutan** yang kemudian diterjemahkan **kedalam enam strategi pertumbuhan ekonomi hijau** yang meliputi berbagai aspek pembangunan, pengelolaan bentang lahan dan penciptaan rantai nilai yang lebih baik.

Masing-masing strategi memiliki capaian dambaan yang berpengaruh langsung pada indikator makro pertumbuhan ekonomi hijau



6 Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau (1)

Strategi	Capaian Dambaan
Strategi 1 Tata ruang dan guna lahan berkelanjutan	1. Alokasi tata guna lahan yang mengakomodasi pengembangan wilayah dengan pemeliharaan kawasan lindung dan kesesuaian lahan
	2. Alokasi perhutanan sosial melalui pemberdayaan komunitas lokal
	3. Prioritasi area rehabilitasi hutan dan lahan
	4. Penataan kawasan pesisir dengan pengelolaan fungsi ekologis, risiko bencana, dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
	5. Alokasi area penggembalaan dan peternakan
	6. Alokasi area pengembangan agroforestri bambu
	7. Perluasan terbatas perkebunan kopi
Strategi 2 Penguatan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap lima modal penghidupan yang sensitif terhadap GEDSI	1. Pengembangan teknologi pertanian cerdas iklim
	2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang unggul pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata
	3. Peningkatan akses perizinan dan permodalan UKM dan IKM
	4. Pengembangan energi terbarukan dengan prioritas daerah tertinggal



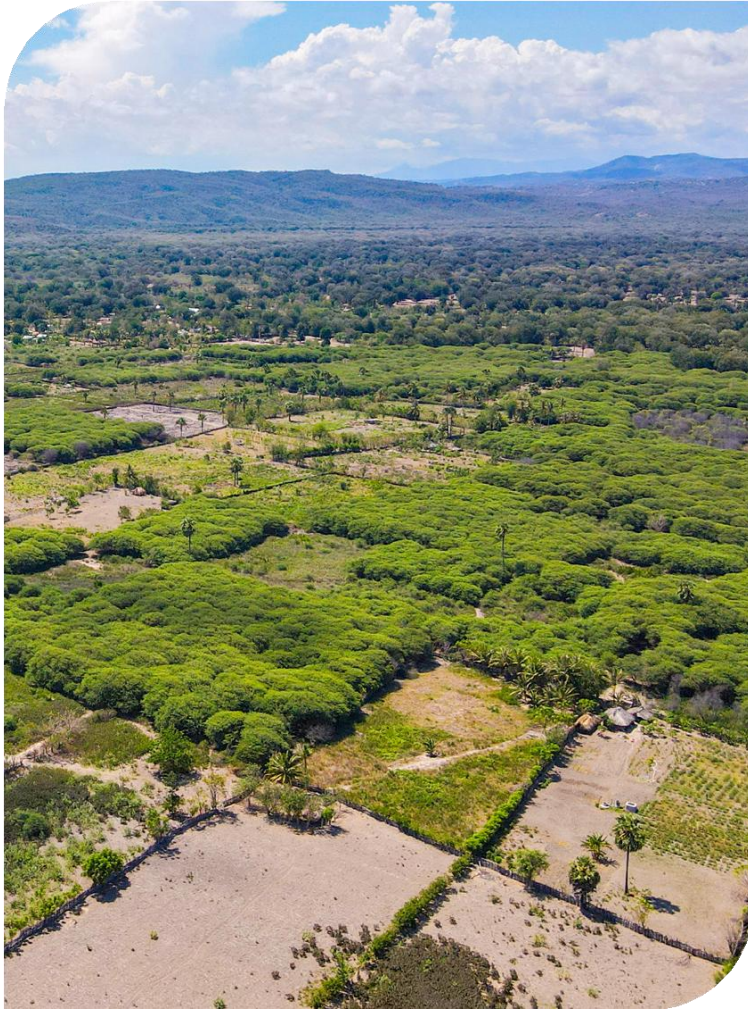
6 Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau (2)

Strategi	Capaian Dambaan
Strategi 3 Optimalisasi produktivitas, diversifikasi, peningkatan daya saing dan nilai tambah sektor unggulan daerah yang berketahanan iklim	1. Pengembangan pupuk organik
	2. Pengembangan sistem irigasi yang efisien
	3. Pelatihan dan pendampingan petani yang menerapkan good agricultural practices (GAP)
	4. Peningkatan akses pasar bagi produk pertanian
	5. Pengembangan rumah potong hewan dan industri pengolahan terintegrasi
	6. Pengembangan industri rumput laut ramah lingkungan
	7. Pengembangan praktik pertanian cerdas iklim untuk komoditas jagung
Strategi 4 Penguatan <i>supply chain</i> dan konektivitas ekonomi wilayah yang berkeadilan	1. Pengembangan sistem distribusi yang efisien
	2. Penerapan sistem pelacakan komoditas untuk manfaat yang adil bagi petani, nelayan, buruh, dan pelaku usaha
	3. Peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam rantai nilai dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi gender
	4. Pengembangan infrastruktur transportasi
	5. Pengembangan infrastruktur maritim
	6. Pengembangan teknologi komunikasi (dan konektivitas digital)
	7. Optimalisasi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus
	8. Pengembangan klaster industri dari sektor unggulan (pertanian, perikanan, pariwisata)
	9. Penguatan kelembagaan koperasi, BUMDes, dan UMKM



6 Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau (3)

Strategi	Capaian Dambaan
Strategi 5 Restorasi daerah aliran Sungai, lahan, hutan, pesisir dan sumber daya air	1. Pengembangan program restorasi ekosistem di lahan terdegradasi, hutan, dan sumber daya air
	2. Penerapan praktik pengelolaan lahan berkelanjutan dengan agroforestri
	3. Penguatan kebijakan konservasi hutan dan sumber daya air
	4. Pemberdayaan masyarakat dalam restorasi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
Strategi 6 Pendanaan inovatif multipihak melalui mekanisme investasi dan insentif jasa lingkungan	1. Penerapan sistem kompensasi imbal jasa lingkungan hidup (KIJLH), terutama untuk penyediaan air bersih
	2. Pemanfaatan imbal jasa lingkungan untuk praktik agroforestri dan pertanian berkelanjutan
	3. Pengembangan jalur ekowisata yang terintegrasi
	4. Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAPE dan TAKE)
	5. Sertifikasi pertanian dan pengelolaan komoditas unggulan
	6. Pembagian manfaat ekonomi karbon



4

Indikator Pertumbuhan Ekonomi Hijau

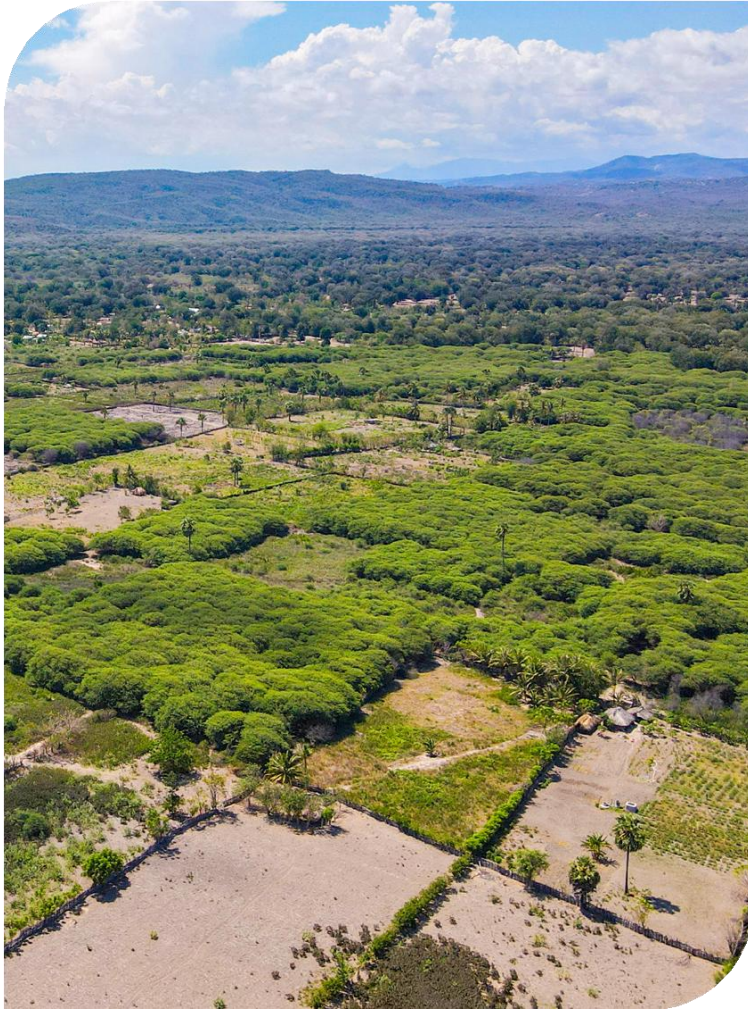




Usulan Indikator Makro Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Dalam dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Nusa Tenggara Timur, pencapaian tujuan diukur melalui perhitungan indikator makro yang memberikan gambaran kinerja pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan hidup, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan.

 Laju deforestasi 1	 Laju perluasan tutupan pohon 2	 Laju perluasan agroforestri 3	 Emisi GRK (berbasis lahan) 4
 Emisi (sumber lain) 5	 Sekuestrasi GRK 6	 Fragmentasi habitat/DIFA 7	 Sedimentasi (ketahanan air) 8
 Aliran permukaan (ketahanan air) 9	 Penurunan risiko bencana kebakaran 10	 Ketahanan Pangan (Ketersediaan, akses & distribusi) 11	 Pendapatan 12
 Keterkaitan sektor lahan dengan sektor lain 13	 Serapan tenaga kerja 14	 Rasio Pendapatan Terhadap keuntungan Usaha 15	 Rasio Keuntungan usaha tani 16
 Laju pertumbuhan PDRB 17	 Rasio penguasaan lahan oleh masyarakat 18	 Intensitas Emisi 19	Indikator Ekonomi Indikator Sosial Indikator Lingkungan



5

Kaidah pelaksanaan dan penutup



Kaidah Pelaksanaan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau

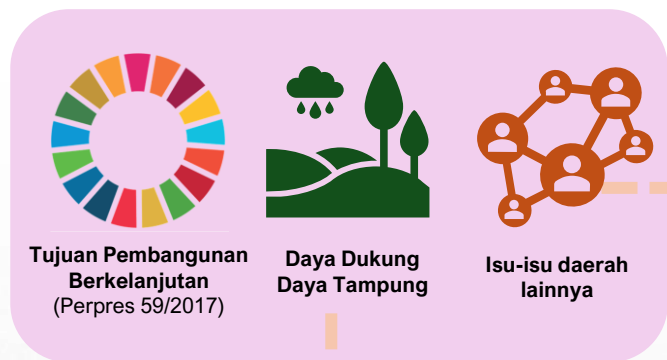


No	Komponen	Penjelasan
1	Komitmen Pelaksanaan	Pimpinan daerah hingga masyarakat memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, dengan memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan bersama dan kelestarian lingkungan
2	Peraturan dan Kebijakan	Peraturan dan kebijakan yang jelas dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, termasuk perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, pengurangan emisi, serta pengembangan praktek-praktek pertanian yang baik.
3	Multistakeholder	Pembentukan dan penguatan forum multistakeholder yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk mengawal dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi hijau
4	Pelibatan Sektor Swasta	Peran aktif sektor swasta dalam mendukung investasi hijau dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan, kerjasama dengan lembaga donor, masyarakat lokal, dan organisasi internasional dapat memperkuat implementasi ekonomi hijau di berbagai sektor.
5	Penerima Manfaat	Penerapan ekonomi hijau harus terasa manfaatnya hingga ke tingkat tapak dan masyarakat desa , dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan akses terhadap peluang ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
6	Mainstreaming dan Operasionalisasi	Integrasi ke dalam semua rencana yang bersifat operasional , baik itu dalam perencanaan pembangunan, program-program pembangunan sektoral, maupun kegiatan investasi daerah.
7	Pembiayaan dan Investasi Hijau	Panduan dalam kegiatan pembiayaan dan investasi hijau , dengan menciptakan insentif bagi investasi yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengembangan komoditas unggulan melalui sistem agroforestri.

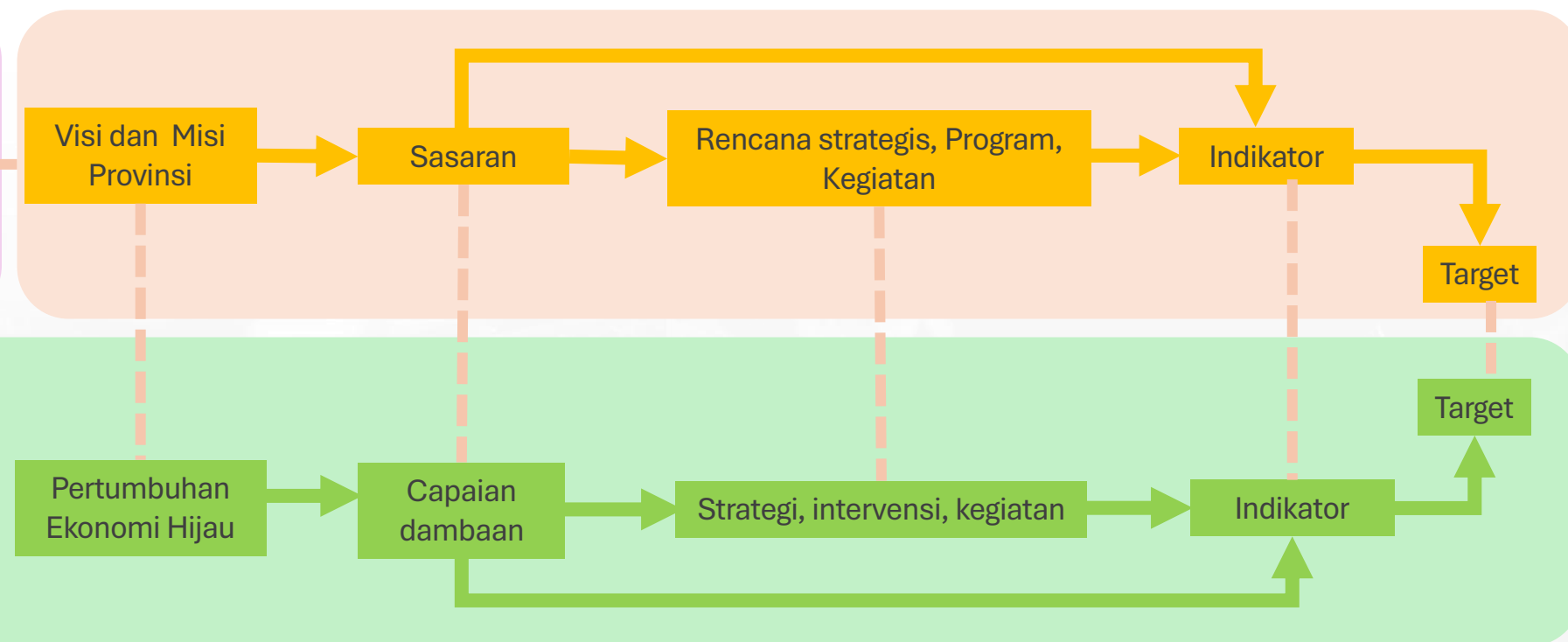
Integrasi dalam Perencanaan



KLHS RPJPD dan RPJMD



RPJPD dan RPJMD



GGP – Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Responsif Gender

Sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya



- RPJPD Provinsi NTT 2025-2045
- RPJMD Provinsi NTT 2025-2029
- RTRWP 2024-2043
- KLHS RTRWP 2024-2043
- KLHS RPJPD 2025-2045
- Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) Benain dan Noelmina 2025-2045



Sinergi dengan Dasa Cita Gubernur NTT



Seluruh tujuan, strategi dan capaian dambaan pertumbuhan ekonomi hijau NTT terkait erat dengan Visi Gubernur NTT yang dijabarkan dalam 7 pilar dan 10 Program Prioritas: Dasa Cita Ayo Bangun NTT. Setiap strategi pertumbuhan ekonomi hijau mendukung pencapaian program-program prioritas NTT.

Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau	Dasacita Gubernur NTT
Strategi 1 Tata guna lahan berkelanjutan	Dasa Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern dan Aman
Strategi 2 Penguatan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap lima modal penghidupan yang sensitif terhadap GEDSI	Dasa Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Dasa Cita 4: Sejahtera bersama Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk masyarakat Dasa Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting Dasacita 6: Sekolah Vokasi Unggulan Berbasis Potensi Daerah
Strategi 3 Optimalisasi produktivitas, diversifikasi, peningkatan daya saing dan nilai tambah sektor unggulan daerah yang berketahanan iklim	Dasa Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern dan Aman Dasa Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Dasa Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal
Strategi 4 Penguatan <i>supply chain</i> dan konektivitas ekonomi wilayah yang berkeadilan	Dasa Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern dan Aman Dasa Cita 7: Jalan, air, listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera Dasa Cita 9: Membangun NTT Digital: Akses Merata, Komunikasi Lancar
Strategi 5 Restorasi daerah aliran sungai, lahan, hutan, pesisir dan sumber daya air	Dasa Cita 7: Jalan, air, listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera
Strategi 6 Pendanaan inovatif multipihak melalui mekanisme investasi dan insentif jasa lingkungan	Dasa Cita 7: Jalan, air, listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera Dasa Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama

Penutup

- Rencana pertumbuhan ekonomi hijau provinsi NTT merupakan salah satu acuan **proses pembangunan terarah** yang memuat visi, *outcome* yang diharapkan, rumusan skenario, strategi yang disepakati, intervensi, dan *ex-ante analysis* yang merupakan gambaran terhadap indikator kinerja di masa yang akan datang
- Rencana pertumbuhan ekonomi hijau disusun berdasarkan prinsip **inklusivitas, integratif dengan berbagai proses pembangunan** yang sedang berjalan, dan disusun berdasarkan ketersediaan dan analisis data yang dapat menjawab kebutuhan
- **Rencana pertumbuhan ekonomi hijau selaras dengan visi-misi Gubernur NTT** (Dasa Cita AYO BANGUN NTT) dan **telah diintegrasikan dengan perencanaan daerah**, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Langkah implementasi dalam proses pembangunan perlu melibatkan masyarakat, *private sector*, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lain, termasuk dalam pengembangan investasi hijau daerah.



Terima kasih



#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id